



PROVINSI JAMBI

JL. R. Moh. Nuradmadibrata, No. 19, Telanai Pura, Buluran
Kenali, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, Jambi 36123

LAPORAN SEMESTER II

**PENYELENGGARAAN
PERCEPATAN
PENURUNAN STUNTING
TAHUN 2023**

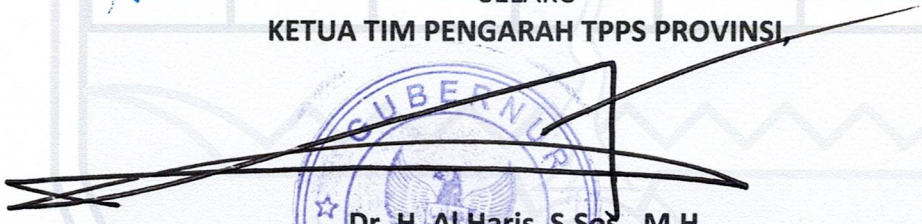
LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

DISAHKAN PADA TANGGAL 10 Januari 2023

OLEH
GUBERNUR JAMBI
SELAKU

KETUA TIM PENGARAH TPPS PROVINSI


Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H.
Gubernur Jambi

SEPUCUK JAMBI SEMBILAN LURAH

DISUSUN OLEH,

KETUA TIM PELAKSANA TPPS



Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I.

Wakil Gubernur Jambi

SEKRETARIS TPPS

Drs. Putut Riyatno, M.Kes.

Kepala Perwakilan BKKBN Jambi

KOORDINATOR BIDANG
PELAYANAN INTERVENSI SENSITIF
DAN SPESIFIK

dr. Mhd. Fery Kusnadi, Sp. OG.

Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Jambi

KOORDINATOR
BIDANG PERUBAHAN
PERILAKU DAN
PENDAMPINGAN
KELUARGA

Drs. Raden Najmi

Kepala Dinas P3AP2
Provinsi Jambi

KOORDINATOR BIDANG
KOORDINASI DAN
KONVERGENSI

Ir. Agus Sunaryo, M.Si.

Kepala BAPPEDA
Provinsi Jambi

KOORDINATOR BIDANG DATA,
MONEV & KNOWLEDGE
MANAGEMENT

Dr. dr. Humaryanto, SP. OT., M.Kes.

Dekan FKIK
Universitas Jambi

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, laporan Percepatan Penurunan Stunting (PPS) Semester II Tahun 2023 telah berhasil disusun. Dengan diterbitkannya laporan ini, diharapkan menjadi bahan evaluasi kita untuk meningkatkan capaian indikator yang belum optimal pada semester I tahun 2023 baik untuk indikator layanan spesifik, indikator layanan sensitif, indikator Pilar 1 sampai Pilar 5 maupun indikator RAN-PASTI.

Memahami bahwa percepatan penurunan stunting hanya bisa berhasil bila dilaksanakan oleh multi pihak dan multi sektor pada semua tingkatan, maka Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi selaku Sekretaris Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Jambi, sejak awal telah berupaya menggali berbagai potensi organisasi profesi, organisasi keagamaan, civitas akademika dengan akademisi dan para mahasiswa, pihak swasta, media, kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah (*Pentahelix*) secara bersama-sama melakukan konvergensi secara sinergis dalam merencanakan, melaksanakan intervensi sensitif dan spesifik, pemantauan, monitoring dan evaluasi bersama secara periodik dan berkala.

Mencermati capaian indikator pada semester II tahun 2023 memberikan harapan dan optimisme untuk mencapai target Tahun 2023 menuju target 12% Tahun 2024 sebagaimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi. Mengingat waktu yang tersisa sangat singkat untuk mencapai target tersebut, maka pada paruh waktu Tahun 2023 ini, intervensi yang dilakukan harus lebih fokus pada sasaran Keluarga Berisiko Stunting (KRS) guna mencegah atau setidaknya mengurangi potensi kelahiran anak stunting yang baru.

Pada kesempatan yang berharga ini, izinkan kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada semua pihak, yang telah mencurahkan pikiran dan gagasannya dalam menyusun laporan Percepatan Penurunan Stunting semester II Tahun 2023 ini. Kami berharap, semoga laporan ini bermanfaat bagi upaya besar kita untuk menurunkan angka stunting di Indonesia umumnya dan di Provinsi Jambi khususnya.

Jambi, Januari 2024
Sekretaris TPPS Provinsi Jambi,
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi



Drs. Putut Riyatno, M.Kes.



SAMBUTAN

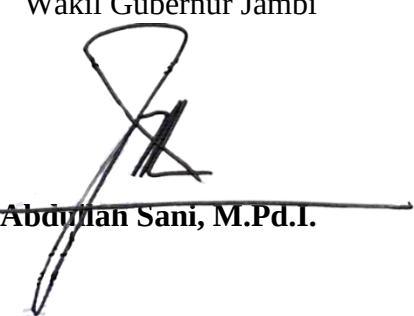
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan hidayah-Nya laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting (PPS) Semester II tahun 2023 telah selesai disusun. Laporan ini merupakan gambaran penyelenggaraan PPS Semester II tahun 2023 yang dilaksanakan secara konvergen oleh Kementerian/Lembaga, TNI-POLRI, Pemerintah Daerah dengan dukungan dan partisipasi aktif dari Swasta, Akademisi, Media, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, serta masyarakat luas. Hasil pelaksanaan seluruh kegiatan tercermin dalam capaian indikator layanan intervensi spesifik, layanan intervensi sensitif, maupun indikator Strategi Nasional (Stranas) yang tertuang dalam Pilar 1 sampai Pilar 5 serta indikator Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN-PASTI).

Pemerintah Indonesia berkomitmen penuh dalam mencegah dan menanggulangi stunting dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas guna menyongsong puncak bonus demografi pada tahun 2030. Salah satu wujud komitmen Pemerintah adalah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang menetapkan target pada tahun 2024 sebesar 14 persen secara nasional dan 12 persen di Provinsi Jambi. Dalam Perpres tersebut juga ditekankan bahwa fokus pendekatan intervensi adalah pada keluarga berisiko stunting, tidak hanya pada balita stunting.

Dengan kekuatan mekanisme penyelenggaraan tersebut, maka target 12 persen tahun 2024 optimis dapat kita capai bersama. Saya berharap seluruh unsur *Pentahelix* untuk berkolaborasi dan berkoordinasi dalam meningkatkan intensitas pelaksanaan program percepatan penurunan stunting secara menyeluruh, berkelanjutan, dan dipastikan sampai kepada sasaran, yaitu keluarga berisiko stunting.

Secara khusus, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh anggota TPPS Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota serta semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan pelaksanaan percepatan penurunan stunting semester pertama tahun 2023. Semoga seluruh sumbangsihnya dapat memberikan manfaat dalam mewujudkan percepatan penurunan stunting untuk generasi Indonesia yang sehat, cerdas dan berkualitas. Aamiin.

Jambi, Januari 2024
Ketua TPPS Provinsi Jambi,
Wakil Gubernur Jambi


Drs. H. Abdulhadi Sani, M.Pd.I.

EXECUTIVE SUMMARY

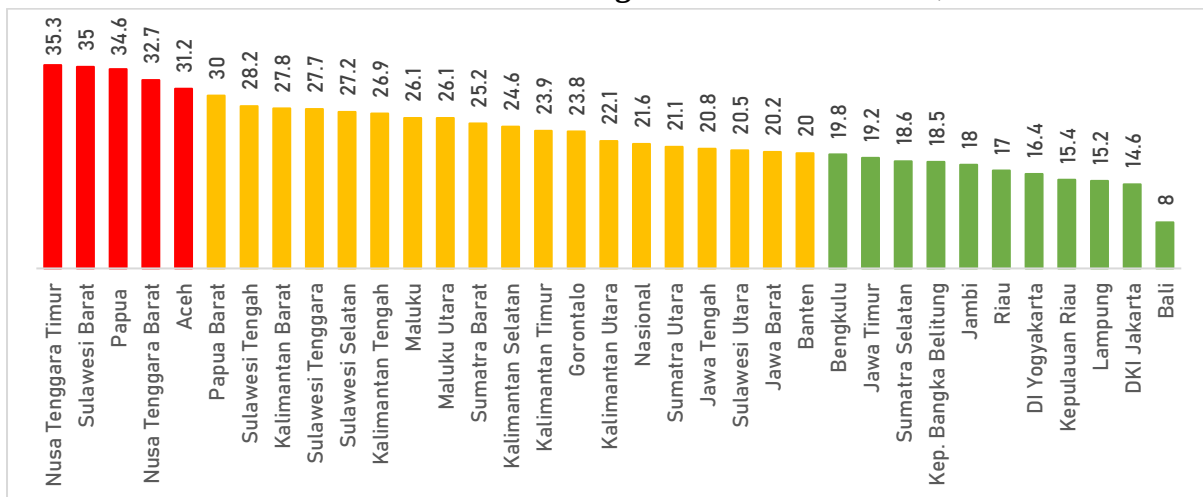
Stunting, merupakan kondisi gagal pertumbuhan pada anak akibat kekurangan gizi kronis menjadi isu serius di Indonesia saat ini dengan angka prevalensi mencapai 21.6%. Angka tersebut mengindikasikan bahwa sekitar dua dari sepuluh anak di negara ini mengalami keterlambatan pertumbuhan dan perkembangan yang dapat berdampak negatif pada status kesehatan mereka secara keseluruhan. Fenomena stunting ini memicu keprihatinan mendalam dari berbagai kalangan, karena bukan hanya masalah kesehatan individu anak, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang terhadap produktivitas dan perkembangan sosial-ekonomi negara.

Salah satu faktor utama penyebab tingginya angka stunting di Indonesia adalah kurangnya akses terhadap pelayanan kesehatan primer dan konsumsi gizi yang memadai, terutama pada keluarga dengan ekonomi rendah. Kekurangan asupan gizi pada masa kehamilan dan 1.000 hari pertama kehidupan anak (mulai dari kehamilan hingga usia dua tahun) dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan fisik dan perkembangan otak yang sifatnya irreversible. Selain itu, kurangnya edukasi tentang pola makan yang seimbang, pentingnya menyusui eksklusif, serta pola asuh juga berperan penting dalam memperburuk masalah stunting ini. Dampak dari tingginya angka stunting sangatlah merugikan. Anak stunting pada akhirnya dapat menghambat potensi mereka untuk mencapai masa depan yang produktif. Anak-anak yang mengalami stunting cenderung memiliki hambatan pada kemampuan belajar, pada pertumbuhan fisik dan kesehatan, yang pada akhirnya dapat menghambat potensi mereka untuk mencapai masa depan yang produktif. Selain itu, stunting juga berhubungan erat dengan peningkatan risiko penyakit kronis seperti diabetes dan penyakit jantung di kemudian hari. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan upaya lintas sektor yang melibatkan pemerintah, masyarakat, serta sektor swasta dan lembaga non-pemerintah lainnya. Upaya tersebut meliputi perbaikan akses terhadap makanan bergizi, peningkatan pendidikan gizi bagi ibu hamil dan ibu menyusui, serta kampanye edukasi bagi masyarakat tentang pentingnya gizi yang baik untuk perkembangan anak. Selain itu, investasi dalam infrastruktur kesehatan dan sanitasi juga penting guna menjamin lingkungan yang mendukung pertumbuhan anak secara optimal. Untuk mendukung semua itu, diperlukan kebijakan publik pada semua tingkatan yang memungkinkan setiap keluarga berisiko stunting memiliki akses dan fasilitas yang memadai untuk mencegah terjadinya stunting.

Pemerintah terus berupaya untuk melakukan percepatan penurunan stunting dengan target yang harus dicapai yaitu 14% di tahun 2024. Berdasarkan hasil SSGI tahun 2022, angka stunting Indonesia sudah menurun menjadi 21,6% dari 24,4% pada tahun 2021. Provinsi Jambi dalam hal ini juga berhasil menurunkan angka prevalensi stunting sebesar 4,4% pada Tahun 2022, sehingga menjadi 18,0% dan menempatkan Provinsi Jambi menjadi 7 Provinsi dengan angka prevalensi terendah di Indonesia.

Kondisi prevalensi stunting di Provinsi Jambi tertinggi berada di Kabupaten Batanghari sebesar 26,2% dan terendah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 9,9%, begitupun dengan 9 kab/kota lainnya mengalami penurunan, akan tetapi terdapat 2 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Batanghari dan Kota Sungai Penuh mengalami kenaikan, sebagaimana sebagai berikut.

Gambar 1. Prevalensi Balita Stunting Berdasarkan Provinsi, SSGI 2022

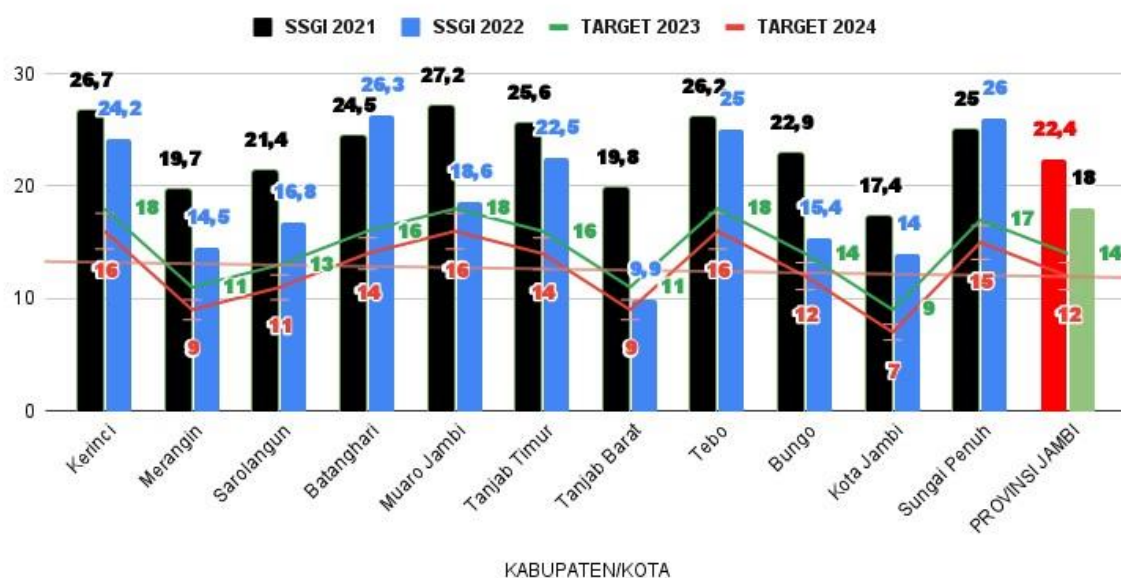


Sumber Data: Buku Saku SSGI 2022

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi 2021-2026, Pemerintah Provinsi Jambi kemudian bermusyawarah bersama kabupaten/kota menetapkan target penurunan prevalensi stunting di 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi yang kemudian disampaikan melalui surat Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Nomor S-050/1684/BAPPEDA-3.2/VI/2022 tentang Target Penurunan Stunting Provinsi Jambi. Penetapan berdasarkan target Provinsi dan disesuaikan dengan kondisi prevalensi stunting di Kabupaten/Kota berdasarkan hasil SSGI 2021, dengan rincian sebagai berikut.

Gambar 2. Angka Prevalensi dan Target Penurunan Prevalensi Stunting di Provinsi Jambi Tahun 2021-2024

ANGKA PREVALENSI DAN TARGET PENURUNAN PREVALENSI STUNTING DI PROVINSI JAMBI TAHUN 2021-2024



Sumber Data: Buku Saku SSGI 2021 dan 2022, RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026

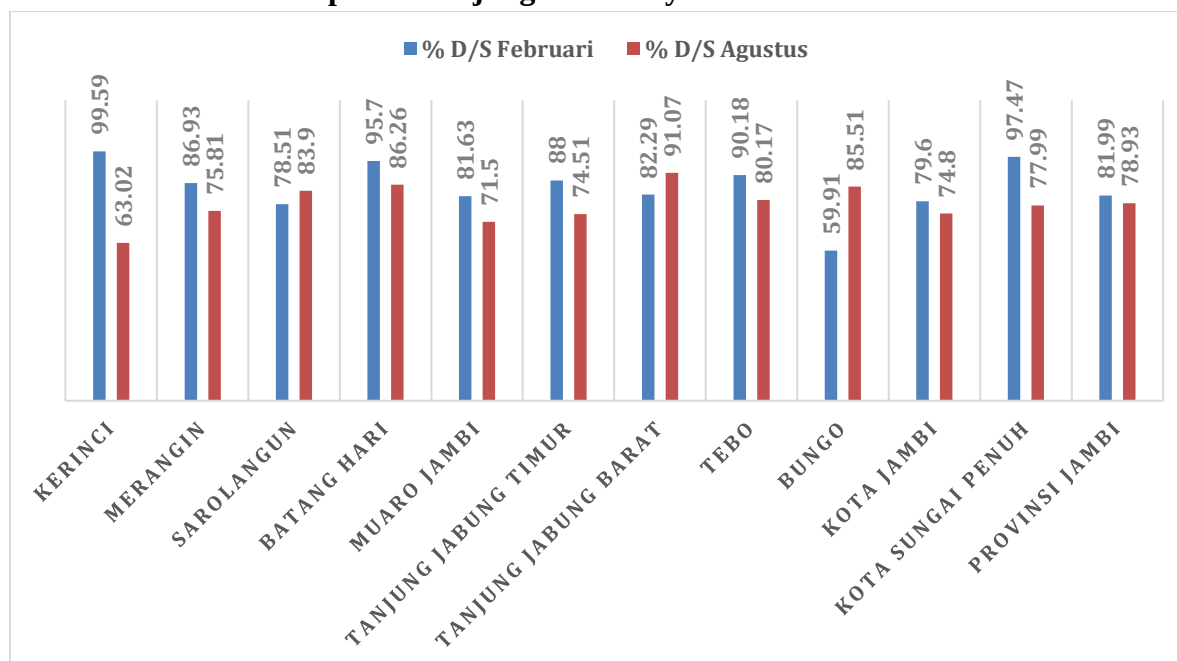
Sejalan dengan penurunan prevalensi stunting di Provinsi Jambi, berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Jambi melalui aplikasi e-PPGBM menunjukkan penurunan yang signifikan berdasarkan jumlah kasus stunting, pada pengukuran Februari 2023 sejumlah 7025 kasus menjadi 6274 kasus pada pengukuran Agustus 2023.

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil e-PPGBM Pengukuran Februari dan Agustus Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Sasaran Balita dari Posyandu	Hasil Pengukuran Pemantauan Pertumbuhan Tahun 2023							
			Februari				Agustus			
			% Input	Stunting	Wasting	Underweight	% Input	Stunting	Wasting	Underweight
1.	KERINCI	17696	99,59	818	218	498	63,02	585	231	764
2.	MERANGIN	31152	86,93	726	374	764	75,81	605	480	946
3.	SAROLANGUN	19256	78,51	746	527	706	83,90	669	618	910
4.	BATANG HARI	21713	95,7	1665	1040	1609	86,26	1319	1003	1566
5.	MUARO JAMBI	26676	81,63	493	457	655	71,50	515	654	910
6.	TANJUNG JABUNG TIMUR	17037	88	662	382	569	74,51	742	539	891
7.	TANJUNG JABUNG BARAT	27559	82,29	869	400	573	91,07	993	435	694
8.	TEBO	24059	90,18	183	461	480	80,17	133	684	708
9.	BUNGO	23669	59,91	329	217	395	85,51	352	323	524
10.	KOTA JAMBI	28349	79,6	497	829	966	74,80	335	535	662
11.	KOTA SUNGAI PENUH	5175	97,47	37	10	42	77,99	26	7	31
JUMLAH		242.341	81.99	7025	4915	7257	78,93	6274	5509	8606

Sumber data: Laporan ePPGBM Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, 2023

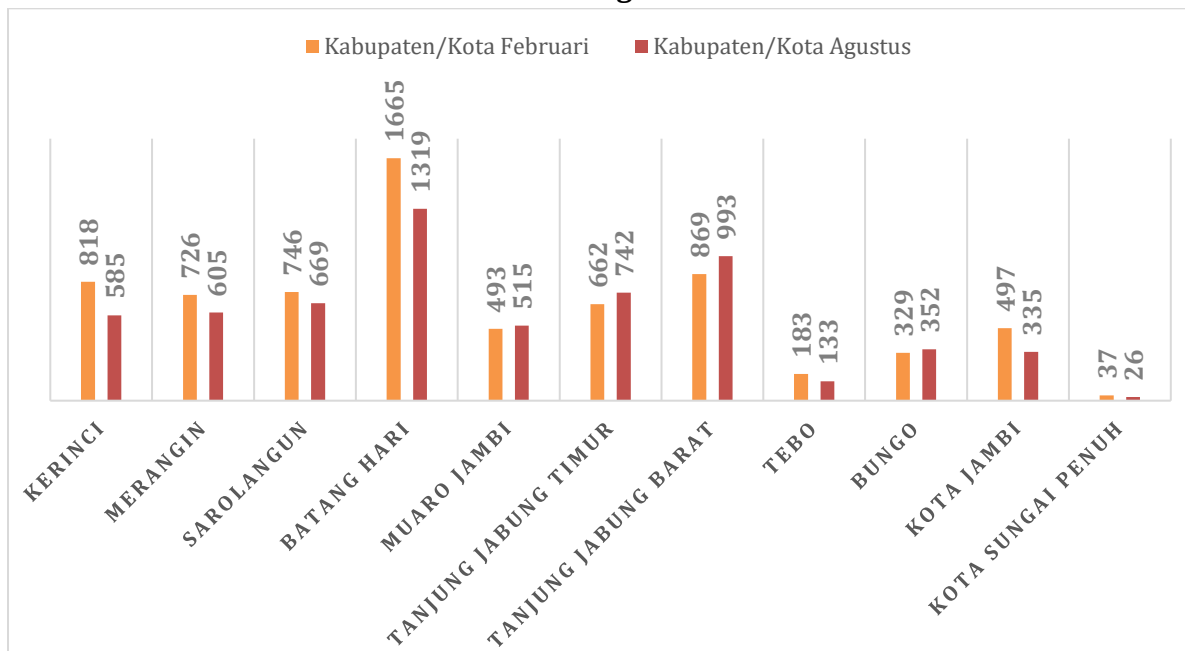
Gambar 3. Grafik Capaian Kunjungan ke Posyandu di Provinsi Jambi Tahun 2023



Sumber data: Laporan ePPGBM Dinas Kesehatan Provinsi Jambi 2023

Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa terjadi penurunan kunjungan dan inputan posyandu di Provinsi Jambi dari bulan Februari ke Agustus sebesar 3%. Penurunan capaian kunjungan dan inputan juga terjadi di Kabupaten/Kota 9 kabupaten/Kota diantaranya Kerinci sebesar 36,5%, Merangin 11,2%, Batanghari 9,4%, Muaro Jambi 10,3%, Tanjung Jabung Timur 13,4%, Tebo 10%, Kota Jambi 4,8%, Kota Sungai Penuh 19,4%. Sedangkan 2 Kabupaten lain mengalami peningkatan, Sarolangun 5,3% dan Bungo 25,6%.

Gambar 4. Grafik Kasus Stunting di Provinsi Jambi Tahun 2023

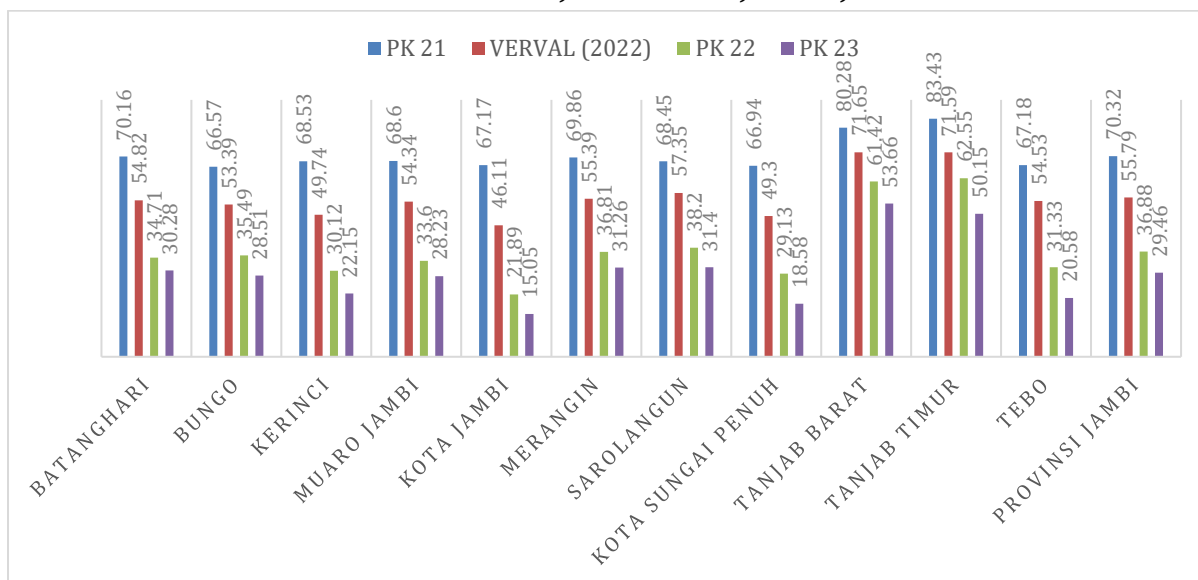


Sumber data: Laporan ePPGBM Dinas Kesehatan Provinsi Jambi 2023

Berdasarkan Gambar 4, terjadi penurunan jumlah kasus stunting di 7 Kabupaten/Kota yaitu Kerinci, Merangin, Sarolangun, Batanghari, Tebo, Kota Jambi, dan Kota Sungai Penuh. Sedangkan 4 Kabupaten/kota lainnya terdapat peningkatan jumlah kasus stunting dari pengukuran sebelumnya di bulan Februari 2023.

Selain data prevalensi stunting dan kasus stunting, Provinsi juga memiliki penurunan yang signifikan terhadap data keluarga berisiko stunting yang didata oleh BKKBN melalui pendataan keluarga. Dimana pada pendataan keluarga tahun 2021 (PK 21) diketahui bahwa persentase keluarga berisiko stunting di Provinsi Jambi sebesar 70,32%, kemudian setelah di verifikasi dan validasi data PK 21 turun menjadi 55,79%, dan pada pendataan keluarga tahun 2022 (PK 22) terjadi penurunan menjadi 36,88%, serta pada PK 23 penurunan kembali menjadi 29,46%, dengan rincian sebagai berikut.

Gambar 5. Trend Penurunan Persentase Keluarga Berisiko Stunting di Provinsi Jambi berdasarkan Data PK 21, Verval 2022, PK 22, dan PK 23



Sumber Data: Pendataan Keluarga 2021, Verifikasi dan Validasi PK 21, dan Pendataan Keluarga 2022, Pendataan Keluarga 2023

Kondisi keluarga berisiko stunting di Provinsi Jambi berdasarkan data PK 23 didapatkan sejumlah 182.385 dengan berbagai faktor risiko nya diantaranya keluarga yang tidak memiliki sumber air minum yang layak sejumlah 76.583, keluarga yang tidak memiliki jamban yang layak sejumlah 95.850, keluarga dengan kondusi bukan peserta KB Modern dan termasuk PUS terlalu muda sejumlah 1.134, terlalu tua 38.044, terlalu dekat sejumlah 434, terlalu banyak sejumlah 33.431, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2. Distribusi Data KRS Berdasarkan Faktor Risiko Pendataan Keluarga 2023

KECAMATAN	KELUARGA SASARAN	FASILITASI LINGKUNGAN		PUS 4 TERLALU (BUKAN PESERTA KB MODERN)			
		JUMLAH KELUARGA YANG TIDAK MEMPUNYAI SAM LAYAK	JUMLAH KELUARGA YANG TIDAK MEMPUNYAI JAMBAN LAYAK	TERLALU MUDA	TERLALU TUA	TERLALU DEKAT	TERLALU BANYAK
BATANGHARI	49691	5616	7502	101	3064	34	2977
BUNGO	64896	4981	11493	162	4000	43	4078
KERINCI	48131	2188	7533	127	1992	22	1321
KOTA JAMBI	83506	986	3000	27	6640	91	4532
KOTA SUNGAI PENUH	15822	257	2091	24	775	9	624
MERANGIN	70326	9002	13814	188	3123	31	2867
MUARO JAMBI	73735	6742	8742	78	5449	67	5065
SAROLANGUN	53012	6087	10599	135	3176	37	3316
TEBO	64200	4285	7404	137	3073	24	2500
TANJUNG JABUNG BARAT	55162	21732	13478	73	4159	52	4004
TANJUNG JABUNG TIMUR	40713	14707	10194	82	2593	24	2147
PROVINSI JAMBI	619194	76583	95850	1134	38044	434	33431

Sumber: Pendataan Keluarga 2022 (PK 22), Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi

Tabel 3. Distribusi Data KRS Berdasarkan Jumlah Pendataan Keluarga 2023

KECAMATAN	KELUARGA SASARAN	KELUARGA BERISIKO STUNTING	%
BATANGHARI	49691	15045	30,28
BUNGO	64896	18499	28,51
KERINCI	48131	10662	22,15
KOTA JAMBI	83506	12567	15,05
KOTA SUNGAI PENUH	15822	2940	18,58
MERANGIN	70326	21981	31,26
MUARO JAMBI	73735	20819	28,23
SAROLANGUN	53012	16646	31,40
TEBO	64200	13211	20,58
TANJUNG JABUNG BARA	55162	29599	53,66
TANJUNG JABUNG TIMU	40713	20416	50,15
PROVINSI JAMBI	619194	182385	29,46

Sumber: Pendataan Keluarga 2022 (PK 22), Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi

Dalam Percepatan penurunan Stunting Provinsi Jambi dalam hal ini merealisasikan komitmen dalam percepatan penurunan stunting dengan menerbitkan beberapa kebijakan di Provinsi Jambi diantaranya sebagai berikut.

1. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, dgn Visi “Jambi Mantap” Penurunan Prevalensi Stunting 14% (2023) dan 12% (2024)
2. SE Gubernur Nomor 156/DP3AP2-5/III/2021 tentang Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting
3. SK Gubernur Nomor 362/Kep.GUB/BAPPEDA-3/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Jambi
4. Surat Gubernur Nomor S-050/1684/BAPPEDA-3.2/VI/2022 tentang Penetapan Target Penurunan Stunting Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota
5. SE Gubernur Nomor 1813/SE/BAPPEDA-3/VII/2022 tentang Dukungan Dunia Usaha Dalam Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Jambi
6. SE Gubernur Jambi Nomor 2686/SE/SETDA.KESRA-3.1/IX/2022 tentang Dukungan Percepatan Penurunan Stunting pada Anak Usia Dini dan Remaja
7. SE Gubernur Nomor 213/SE/BAPPEDA-3/II/2023 tentang Dukungan Optimalisasi Pelaksanaan Surveilans Gizi Dalam Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Jambi
8. SE Gubernur Nomor 100/SE/DP3AP2/II/2023 tentang Dukungan Kampanye Perubahan Perilaku dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Jambi
9. Instruksi Gubernur No 7 Tahun 2023 Tentang Dukungan Lintas Sektor Dalam Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Jambi Melalui Program Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting
10. Instruksi Gubernur No 3 Tahun 2023 Tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas di Provinsi Jambi

11. SK Gubernur Jambi Nomor 432/KEP.GUB/DISKES-2.1/2023 Tentang Penetapan Bapak Asuh Anak Stunting Pemerintah Provinsi Jambi
12. SE Gubernur Jambi Nomor 1164/SE/SETDA.KESRA-3.1/V/2023 tentang Pelayanan Keluarga Berencana Pasca Persalinan (KBPP) dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Jambi
13. SK Gubernur Nomor 255/KEP.GUB/BAPPEDA-3/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 362/KEP.GUB/BAPPEDA-3/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Jambi
14. SK Gubernur Jambi Nomor 269/KEP.GUB/SETDA.KESRA-3.1/2023 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas Provinsi Jambi
15. SK Gubernur Jambi Nomor 632/KEP.GUB/SOSDUKCAPIL/2022 tentang Pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Provinsi Jambi Masa Bakti Tahun 2022-2027
16. SK Gubernur Jambi Nomor 386/KEP.GUB/DP3AP2-2.2/2022 tentang Penetapan Desa/kelurahan Model Replika Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak
17. SE Ketua PKK Provinsi Jambi Nomor E/001/PKK.Prov/V/2023 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024

Selain itu Pemerintah Provinsi Jambi juga mengalokasikan dukungan anggaran dalam percepatan penurunan stunting di beberapa OPD dengan total anggaran 96.422.350.717 pada tahun 2022 dan sejumlah 63.660.836.248 pada tahun 2023 yang tersebar di beberapa OPD antara lain, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 4. Dukungan Anggaran Pemerintah Provinsi Jambi Dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2022 dan 2023

OPD	Jumlah Anggaran terkait PPS		
	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Dinas Kesehatan	62.749.839.090,00	58.881.050.732,00	52.830.899.942,00
Dinas PUPR	32.018.256.390,00	1.600.000.000,00	2.890.884.200,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	-	250.424.829,00	5.848.469.684,00
Dinas Ketahanan Pangan	1.654.255.237,00	406.959.797,00	2.576.969.800,00
DP3AP2	-	-	75.000.000,00
Dinas Tanaman Pangan	-	-	8.955.500.000,00
BAPPEDA	-	2.522.400.890,00	-
Total	96.422.350.717,00	63.660.836.248,00	73.177.723.626,00

Sumber data: SIPD 2022, 2023, dan 2024

Berdasarkan tabel diatas, terdapat penurunan penganggaran percepatan penurunan stunting di APBD Provinsi Jambi Tahun 2022 dan 2023. Hal ini diakibatkan karena adanya rasionalisasi APBD Provinsi Jambi pada tahun 2023, akan tetapi BAPPEDA dan BAKEUDA tetap memprioritaskan program dan kegiatan terkait percepatan penurunan stunting untuk tidak

di refofusing anggaran. Sedangkan perencanaan penganggaran tahun 2024 terkait percepatan penurunan stunting akan mengalami kenaikan dari tahun 2023.

UNGGULAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI PROVINSI JAMBI

Percepatan penurunan stunting di Provinsi Jambi mengunggulkan pelibatan lintas sektor melalui program Bapak Asuh Anak Stunting. Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya 3 kebijakan dalam optimalisasi program tersebut diantaranya SE Gubernur Nomor 1813/SE/BAPPEDA-3/VII/2022 tentang Dukungan Dunia Usaha Dalam Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Jambi, Instruksi Gubernur No 7 Tahun 2023 Tentang Dukungan Lintas Sektor Dalam Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Jambi Melalui Program Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting, dan SK Gubernur Jambi Nomor 432/KEP.GUB/DISKES-2.1/2023 Tentang Penetapan Bapak Asuh Anak Stunting Pemerintah Provinsi Jambi. Hingga 31 Desember 2023 telah diterima sebanyak 3.759 paket manfaat dalam bentuk makanan tambahan, paket antropometri kit, paket bantuan usaha, bibit, KIE, fasilitasi jamban, dan air bersih dari sebanyak 301 pemberi manfaat yang terdiri dari pemangku kepentingan, dunia usaha, organisasi, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan individu dengan total nilai rupiah mencapai 2.221.337.300 (tabel 4). Angka ini jauh meningkat dari semester sebelumnya dengan jumlah peningkatan sebesar 1.421.621.500.

Tabel 4. Dukungan Anggaran Pemerintah Provinsi Jambi Dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2022 - 2023

Kab/Kota	Nilai (Rp)	Pemberi Manfaat	Penerima Manfaat
KOTA JAMBI	Rp195.728.300,00	41	1467
SUNGAI PENUH	Rp22.128.000,00	9	37
TANJUNG JABUNG TIMUR	Rp121.610.000,00	4	164
TANJUNG JABUNG BARAT	Rp1.004.150.000,00	6	138
KERINCI	Rp220.763.000,00	4	54
MUARO JAMBI	Rp446.100.000,00	187	1046
TEBO	Rp16.850.000,00	6	60
SAROLANGUN	Rp100.050.000,00	13	447
MERANGIN	Rp28.680.000,00	17	106
BATANGHARI	Rp55.228.000,00	9	201
BUNGO	Rp10.050.000,00	5	39
TOTAL	Rp2.221.337.300,00	301	3759

Sumber data: Pencatatan dan Pelaporan Bapak Asuh Anak Stunting Provinsi Jambi

CAPAIAN AGENDA KERJA TPPS PROVINSI JAMBI

Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Jambi mendorong dan mengawal kinerja TPPS. Pengawasan dilaksanakan dalam 5 (lima) bidang dengan sasaran dan target capaian indikator sebagai berikut.

Sekretaris Pelaksana

NO	URAIAN	CAPAIAN
KOORDINASI, EVALUASI DAN PELAPORAN		
1	Minilokakarya Kecamatan	Terlaksana di 144 Kecamatan
2	Rembuk Stunting Provinsi	Belum Terlaksana
3	Rembuk Stunting Tingkat Kecamatan	Terlaksana di 144 Kecamatan
4	Rembuk Stunting Tingkat Kab/Kota	Terlaksana di 11 Kabupaten/Kota
5	Audit Kasus Stunting	Terlaksana sebanyak 2 kali di 11 Kabupaten/Kota
6	Penguatan Kapasitas Kader ditingkat Desa/Kel	Terlaksana di 11 Kabupaten/Kota
7	Penguatan Kapasitas TPPS Desa/Kel	Terlaksana di 11 Kabupaten/Kota
8	Sinkronisasi dan Pemutakhiran Data	Terlaksana di 11 Kabupaten/Kota
PELAKSANAAN KEGIATAN TPPS		
8	Koordinasi Penentuan Desa/Kel Lokasi Fokus	Terlaksana di 11 Kabupaten/Kota
9	Koordinasi Sinkronisasi Program dan Kegiatan OPD di Lokasi Fokus	Terlaksana di 11 Kabupaten/Kota
10	Rapat Evaluasi Kinerja Bidang	Terlaksana 1 kali
11	Rapat Evaluasi Kinerja TPPS	Terlaksana sebanyak 6 kali Rapat Kinerja TPPS
12	Monitoring Tim Pendamping Keluarga	Terlaksana 2 kali monev
13	Pelaporan Kegiatan TPPS	Terlaksana 2 laporan

Bidang Pelayanan Intervensi Sensitif dan Intervensi Spesifik

NO	KEGIATAN	TARGET 2023	CAPAIAN TAHUN 2023
1	Capaian prevalensi stunting		18,0%
2	Terselenggaranya desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);	100%	94,2%
3	Memastikan calon pengantin menerima Tablet Tambah Darah (TTD);	58	83,3%
4	Memastikan ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang menerima tambahan asupan gizi;	90	95,7%
5	Memastikan ibu hamil mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD)	80	53,1

6	Memastikan bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;	80	68,8
7	Memastikan anak usia 6-23 bulan mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (ASI);	80	89,0%
8	Memastikan anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi;	90	90,3%
9	Memastikan ketersediaan bahan pangan untuk mendukung percepatan penurunan stunting	100	100,0
10	Memastikan remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin).	90%	17,0%
11	Memastikan ibu pasca persalinan mendapatkan pelayanan keluarga berencana	70	55,9%
12	Memastikan unmet need mendapatkan pelayanan keluarga berencana.	7,4	9,8 %

Bidang Komunikasi Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga

NO	KEGIATAN	TARGET DAN TAHUN CAPAIAN	CAPAIAN TAHUN 2023
1	Terlaksananya kampanye nasional pencegahan Stunting;	3 Kanal/Metode	100%
2	Persentase keluarga yang stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS);	90%	67,8
3	Persentase keluarga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);	70%	71,0%
4	Persentase kabupaten/kota dengan Age Specific Fertility Rate/ASFR (15-19) paling sedikit 18 per 1.000	90%	9,1%
5	Memastikan keluarga berisiko stunting mendapatkan pendampingan	90%	45,1%
6	Memastikan keluarga berisiko stunting mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri.	90%	38,8%
7	Memastikan calon Pasangan Usia Subur (PUS) menerima pendampingan Kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah.	90%	66,8%

8	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki minimal 20 tenaga pelatih berjenjang tingkat dasar serta pendidikan dan pelatihan pengasuhan stimulasi penanganan Stunting bagi guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);	100%	100%
9	Persentase desa/kelurahan yang memiliki guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terlatih pengasuhan stimulasi penanganan Stunting sebagai hasil pendidikan dan pelatihan di kabupaten/kota;	90%	48,9%
10	Persentase sistem pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI);	70%	56,5%
11	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita (BKB) tentang pengasuhan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK);	90%	92,7%
12	Persentase Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Bina Keluarga Remaja (BKR) yang melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja.	90%	84,7%
13	Terlaksananya forum komunikasi perubahan perilaku dalam penurunan Stunting lintas agama;	100%	100%
14	Persentase pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan Stunting.	90%	88,2%
15	Memastikan kabupaten mendapatkan fasilitasi sebagai daerah ramah perempuan dan layak anak dalam percepatan penurunan stunting.	100%	81,8%
16	Tersedianya bidan desa/kelurahan sesuai kebutuhan	100%	94,1%

Bidang Koordinasi dan Konvergensi

NO	KEGIATAN	TARGET DAN TAHUN CAPAIAN	CAPAIAN TAHUN 2023
1	Tersedianya kebijakan/peraturan bupati/wali kota tentang Kewenangan desa/kelurahan dalam penurunan stunting;	Seluruh kabupaten/kota	100%
2	Melaksanakan aksi konvergensi percepatan penurunan Stunting	100%	100%
3	Terselenggaranya rapat koordinasi yang dihadiri oleh TPPS di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.	1 kali setiap tahun	100%
4	Terselenggaranya rapat koordinasi yang dihadiri oleh TPPS di tingkat Kecamatan	2 kali setiap tahun	100%
5	Melaksanakan konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan jenis, cakupan, dan kualitas intervensi gizi di tingkat Kabupaten dan desa.	Seluruh kabupaten/kota	100%
6	Desa/kelurahan dapat mengintegrasikan program dan kegiatan percepatan penurunan Stunting dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa/kelurahan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rencana Kerja dan Anggaran Desa);	Seluruh kabupaten/kota	100%
7	Desa/kelurahan dapat meningkatkan alokasi dana desa/kelurahan untuk Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dalam penurunan Stunting;	90%	90%
8	Desa/kelurahan melakukan konvergensi Percepatan Penurunan Stunting;	80%	80%
9	Terselenggaranya rembuk stunting tingkat kecamatan.	2 kali per tahun	100%
10	Melaksanakan penguatan komitmen desa/kelurahan bebas stunting	setiap tahun	100%

Bidang Data, Monitoring, Evaluasi, dan Knowledge Management

NO	KEGIATAN	TARGET DAN TAHUN CAPAIAN	CAPAIAN TAHUN 2023
1	Pemerintah desa/kelurahan yang memiliki kinerja baik dalam konvergensi percepatan penurunan Stunting;	90%	90%
2	Publikasi data Stunting tingkat kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan	1 publikasi Setiap tahun	100%
3	Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi percepatan penurunan Stunting di pemerintah daerah kabupaten/ kota dan desa/keurahan;	2 kali setiap tahun	100%
4	Terselenggaranya audit anak berusia di bawah dua tahun (baduta) Stunting	100%	100%
5	Tersedianya sistem data dan informasi terpadu untuk percepatan penurunan Stunting; Tersedianya data keluarga risiko Stunting yang termutakhirkan melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA);	target 1 Setiap 6 bulan	100%
6	Tersedianya sistem skrining dan konseling calon Pasangan Usia Subur (PUS) siap nikah;	target 1 setiap tahun	100%
7	Persentase sistem data surveilans gizi elektronik dalam pemantauan intervensi gizi untuk penurunan Stunting.	100%	100%
8	Melakukan penguatan riset dan inovasi serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi.	100%	100%
9	Tersedianya data hasil surveilans keluarga berisiko stunting	100%	100%
10	Terselenggaranya penguatan kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan modul kesehatan dan gizi.	90%	100%
11	Tersedianya data cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan pangan nontunai	90%	100%

12	Tersedianya data cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan;	90%	100%
13	Memastikan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui dan anak berusia di bawah dua tahun (baduta) menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur (karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin dan mineral dan atau Makanan Pendamping ASI/MP-ASI).	90%	62,4%

PENUTUP

1. Kesimpulan

Percepatan penurunan Stunting perlu dilakukan untuk menjamin generasi kita dimasa depan menjadi generasi yang potensial yang membawa bangsa ini kepada kemajuan yang lebih baik. Oleh karena itu diperlukan kerjasama yang lebih besar atau yang disebut konvergensi agar menjaga, mengendalikan serta mencegah sehingga potensi status gizinya berubah akibat dari tata kelola yang salah proses pemenuhan serta asuhan yang tidak tepat.

Upaya Percepatan Penurunan Stunting perlu dilakukan secara timbal balik melalui hubungan secara vertikal maupun horizontal, yaitu melalui pemerintah maupun tanggung jawab bersama antar masyarakat. Peran semua stakeholders sangat penting untuk mendorong percepatan penurunan stunting dengan berbagai program dan kegiatan yang tepat sasaran sehingga pemenuhan gizi menjadi lebih baik, pola asuh lebih terarah sehingga menjamin generasi menjadi lebih berkualitas di masa depan dan inilah aset yang perlu kita rawat.

Demikian laporan ini disusun sebagai gambaran pelaksanaan percepatan penurunan stunting di Provinsi Jambi Semester II Tahun 2023.

2. Rekomendasi

Dalam pelaksanaan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Jambi dibutuhkan dukungan beberapa hal sebagai berikut.

1. Penguatan dan peningkatan komitmen dari Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/kota, Kecamatan, dan Desa Kelurahan dalam percepatan penurunan stunting.
2. Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan mendukung program dan anggaran percepatan penurunan stunting.
3. Memastikan pelayanan kepada Balita Kasus Stunting dan Keluarga Berisiko Stunting terpenuhi dengan tepat sasaran dan tepat layanan kebutuhan.
4. Optimalisasi program pendampingan kepada Calon Pengantin, Ibu Hamil, Ibu Pascasalin, dan Baduta.
5. Peningkatan kampanye perubahan perilaku kepada masyarakat terkait dengan pencegahan dan penanggulangan stunting yang baik dan efektif dengan berbagai pendekatan baik secara sosial, pendidikan, dan agama.
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat Pemantauan Pertumbuhan bayi balita dengan melibatkan peran lintas sektor dalam penggerakan masyarakat ke Posyandu.
7. Memastikan terwujudnya 3 standar pasti pada Posyandu (SDM terlatih, alat terstandar, dan pelaksanaan SOP sesuai standar)
8. Terus meningkatkan program Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting dengan melibatkan seluruh lintas sektor.
9. Pemanfaatan dan Integrasi Data Stunting sebagai dasar penentuan kebijakan dan sasaran pelayanan intervensi.
10. Pengawasan program intervensi yang tersedia agar dapat tepat tujuan dan sasaran.
11. Peningkatan ekonomi keluarga dalam rangka kemandirian pemenuhan kebutuhan gizi keluarga dalam rangka percepatan penurunan stunting.
12. Optimalisasi peran dan fungsi seluruh lini lapangan dalam percepatan penurunan stunting (Kader, KPM, TPK, PKK, dan lainnya)
13. Meningkatkan cakupan ketersediaan dan akses sanitasi dan air minum yang layak.

14. Memastikan berjalannya manajemen dan tatalaksana penanganan kepada balita stunting atau memiliki risiko stunting, serta ibu hamil KEK.
15. Meningkatkan inovasi lokal dalam rangka percepatan penurunan stunting.
16. Upaya percepatan dalam pencapaian target indikator sesuai dengan PerPres 72/21 dan Peraturan BKKBN 12/12 pada tahun 2024.

Laporan Capaian Indikator TPPS Provinsi

Tim Percepatan Penurunan Stunting		
Pilih Periode Laporan *		
☐ Semester 1	☒ Semester 2	
Pilih Tahun *		
☒ Tahun 2023	☐ Tahun 2024	
Provinsi *		
☐ ACEH	☐ SUMATERA UTARA	☐ SUMATERA BARAT
☐ RIAU	☒ JAMBI	☐ SUMATERA SELATAN
☐ BENGKULU	☐ LAMPUNG	☐ KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
☐ KEPULAUAN RIAU	☐ DKI JAKARTA	☐ JAWA BARAT
☐ JAWA TENGAH	☐ DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	☐ JAWA TIMUR
☐ BANTEN	☐ BALI	☐ NUSA TENGGARA BARAT
☐ NUSA TENGGARA TIMUR	☐ KALIMANTAN BARAT	☐ KALIMANTAN TENGAH
☐ KALIMANTAN SELATAN	☐ KALIMANTAN TIMUR	☐ KALIMANTAN UTARA
☐ SULAWESI UTARA	☐ SULAWESI TENGAH	☐ SULAWESI SELATAN
☐ SULAWESI TENGGARA	☐ GORONTALO	☐ SULAWESI BARAT
☐ MALUKU	☐ MALUKU UTARA	☐ PAPUA
☐ PAPUA BARAT		

Capaian Indikator Lampiran Provinsi

» Blok 1A : Indikator Pilar 1

» » Indikator 1A7 : Persentase Pemerintah Daerah provinsi yang meningkatkan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk Percepatan Penurunan Stunting

Apakah Pemerintah Daerah provinsi meningkatkan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk Percepatan Penurunan Stunting? *



Ya



Tidak

» » Indikator 1A8 : Persentase Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang meningkatkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan Stunting

Jumlah kabupaten/kota	Jumlah kabupaten/kota yang meningkatkan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk Percepatan Penurunan Stunting
11	11

» Blok 1B : Indikator Pilar 2

» » Indikator 2B5 : Jumlah kabupaten/kota yang memiliki minimal 20 tenaga pelatih berjenjang tingkat dasar serta pendidikan dan pelatihan pengasuhan stimulasi penanganan Stunting bagi guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

	*
Jumlah kabupaten/kota yang memiliki minimal 20 tenaga pelatih berjenjang tingkat dasar serta pendidikan dan pelatihan pengasuhan stimulasi penanganan stunting bagi guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
11	

» Blok 1C : Indikator Pilar 3

» » Indikator 3C1 : Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang mengintegrasikan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran Daerah)

	*	*
Apakah provinsi mengintegrasikan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah?		Jumlah kabupaten/kota yang mengintegrasikan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah
☒ Ya ☐ Tidak		11

» » Indikator 3C2 : Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan aksi konvergensi Percepatan Penurunan Stunting

	*
Jumlah	
kabupaten/kota	
yang melaksanakan	
aksi konvergensi	
Percepatan	
Penurunan Stunting	
11	

» » **Indikator 3C15 : Persentase kabupaten/kota yang mendapatkan fasilitasi sebagai daerah ramah perempuan dan layak anak dalam Percepatan Penurunan Stunting.**

	*
Jumlah	
kabupaten/kota	
yang mendapatkan	
fasilitasi sebagai	
daerah ramah	
perempuan dan	
layak anak dalam	
Percepatan	
Penurunan Stunting	
9	

» **Blok 1E : Indikator Pilar 5**

» » **Indikator 5E1 : Persentase Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki kinerja baik dalam konvergensi percepatan penurunan stunting**

	*
Jumlah Pemerintah	
Daerah	
kabupaten/kota	
yang memiliki	
kinerja baik dalam	
konvergensi	
percepatan	
penurunan stunting	
11	

» » **Indikator 5E5 : Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting di Pemerintah Daerah Provinsi**

Apakah Pemerintah *
Daerah Provinsi
melaksanakan
pemantauan dan
evaluasi percepatan
penurunan
stunting?



Ya



Tidak